

Pengaruh Kompleksitas Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

Melia Andesti^{1*}, Henri Agustin²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: meliaandesti17@gmail.com

Abstract

The review is conducted with the purpose of acquiring empirical evidence related the effect of complexities of local government, the local size government and economic growth to internal control weakness. The population of this research are local government in Aceh and Sumatera Utara Province of 2017-2019. The sample were determined by using purposive sampling method. Based on predetermined criteria, 156 local governments have been selected as samples. The kind of information use is secondary data from the report of local government finances from the audit board of BPK, and Gross Domestic Regional Product (PDRB) report. This research was carried out using multiple linear regression analysis with help of software SPSS version 25. The aftereffects of this research showed that complexities of local government has a significant positive effect on internal control weakness, the local size government has a significant negative effect on internal control weakness. Meanwhile economic growth has not significant effect on internal control weakness.

Keywords : *Internal Control Weakness; Complexities; Size; Economic Growth.*

How to cite (APA 6th style)

Andesti, M. & Agustin, H. (2022). Pengaruh Kompleksitas Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4 (1), 131-149.

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang No 32 dan 33 tahun 2004, menandai diterapkannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No 32 dan 33 tahun 2004 mengakibatkan terjadinya perubahan dalam tatanan pemerintahan sekaligus perubahan dalam tata kelola keuangan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi (Alawiyah dkk, 2020). Pemda dalam menjalankan otonominya juga bertanggung jawab menyediakan pengendalian yang memadai mencakup semua aspek tata kelola pemerintahan guna menghindari kasus *fraud* (kecurangan) dalam pemerintahan. Adapun yang mendasari pelaksanaan pengendalian intern pemerintah adalah berlandaskan PP No 60 tahun 2008, dimana pengendalian intern yang dijalankan bermaksud untuk menjaga keamanan aset negara dari pencurian, mendorong efisiensi dalam pencapaian tujuan, serta meningkatkan ketelitian dan keandalan data akuntansi dalam laporan. Pelaksanaan pengendalian intern yang tidak optimal akan menyebabkan lemahnya pengendalian intern,

sehingga mengakibatkan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan organisasi (Sutaryo dan Sinaga, 2018).

Dalam IHPS Semester I 2019 dirincikan hasil pemeriksaan BPK atas 542 LKPD di Indonesia. Dimana temuan kelemahan sistem pengendalian intern paling banyak ditemukan pada pemda yang berada di Pulau Sumatera, yang didominasi oleh temuan kelemahan sistem pengendalian internal Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sebanyak 571 temuan. Lemahnya implementasi sistem pengendalian intern juga dapat dilihat dari sejumlah kasus kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan seperti yang dipublikasikan dalam *Indonesian Corruption Watch* terkait kasus penyelewengan dana bansos dan hibah yang terjadi pada Sumatera Utara senilai 247M pada tahun 2015 akibat kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD, dimana penyelewengan ini dilakukan dengan mengeluarkan SPJ penyaluran bansos yang tidak sesuai ketentuan. Temuan kasus terkait kelemahan pengendalian intern yang masih tinggi pada sejumlah pemerintahan daerah mengakibatkan tujuan awal yang ingin dicapai pemerintah daerah untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan akuntabel tidak terpenuhi, yang apabila hal tersebut diabaikan akan memberikan kerugian yang cukup besar terhadap pemda itu sendiri. Atas dasar hal tersebut penelitian terkait kelemahan pengendalian intern ini urgen atau penting dilakukan agar dapat diketahui faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kelemahan implementasi sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah.

Kompleksitas merupakan salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Kompleksitas daerah dapat diukur dengan jumlah kecamatan (Martani dan Zaelani, 2011). Tingginya kompleksitas yang dimiliki oleh suatu daerah yang ditandai dengan banyaknya jumlah kecamatan dengan letak area kerja yang tersebar menyebabkan kegiatan yang dikendalikan akan semakin banyak. Tingginya kompleksitas yang terdapat pada suatu daerah menyebabkan tingkat pengawasan terhadap pengendalian intern yang dijalankan menjadi rendah Setyaningrum dan Syafitri (2012), akibatnya konsistensi penerapan pengendalian intern yang sesuai ketentuan pada setiap kecamatan tidak diawasi secara optimal oleh pemda sehingga berpeluang terjadinya pelaksanaan sistem pengendalian internal yang tidak sesuai ketentuan.

Faktor kedua adalah ukuran pemerintah daerah. Panjaitan (2004) dalam Majid, dkk (2017) menyebutkan bahwasanya untuk sebuah pemerintahan daerah total aset dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur guna memproksikan besar kecilnya suatu pemerintah daerah. Total aset yang dimiliki oleh suatu pemda dengan jumlah yang besar akan mendorong kesadaran terhadap pihak manajemen pemerintah dalam meningkatkan pengawasan yang baik melalui penerapan sistem pengendalian internal yang optimal untuk menjaga keamanan aset yang dimiliki dari segala bentuk kecurangan (Hartono, dkk 2014). Sumberdaya yang besar menjadikan penerapan pengendalian intern menjadi lebih baik melalui pengalokasian sumberdaya yang dimiliki untuk kepentingan pemerintahan seperti melakukan *maintenance* terhadap sistem pengendalian intern, sehingga mampu mengurangi peluang terjadinya pelaksanaan tugas yang tidak sesuai ketentuan (Putri dan Mahmud, 2015).

Faktor selanjutnya ialah pertumbuhan ekonomi, adapun ukuran yang dapat digunakan dalam melihat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat laju PDRB pada masing masing daerah (Bodieono, 1985) dalam (Majid, dkk, 2017). Dalam menggerakkan aktivitas perekonomian suatu daerah pemerintah memiliki peran yang krusial untuk mendorong peningkatan aktivitas perekonomian sesuai potensi yang dimiliki masing-masing daerah dengan melakukan perencanaan dan pembaharuan program yang dirancang,

menetapkan kebijakan yang sesuai, mengalokasikan belanja dengan memprioritaskan pada sektor ekonomi yang produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi, serta melakukan pengawasan yang baik (Majid, dkk, 2017). Guna menurangi resiko yang dapat terjadi akibat pertumbuhan ekonomi pemerintah akan berusaha meningkatkan pengendalian internal dengan merumuskan pendekatan manajemen risiko dan melakukan penyesuaian pada kegiatan pengendalian dengan penetapan prosedur pengendalian yang baru dan tepat yang berorientasi pada tujuan (Hartono, dkk, 2015). Doyle, Ge dan McVay (2007) menyebutkan proses penyesuaian kegiatan pengendalian intern agar dapat menerapkan sistem pengendalian internal yang baru akan memerlukan waktu penyesuaian yang lama. Sehingga diperkirakan masalah kelemahan pengendalian intern akan meningkat selama rentang waktu penyesuaian pengendalian intern tersebut (Martani dan Zaelani, 2011).

Penelitian yang meneliti tentang kelemahan pengendalian intern telah mengemukakan berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kelemahan pengendalian intern, penggunaan proksi pengukuran yang berbeda dan periode pengamatan yang terlalu singkat menyebabkan hasil penelitian yang dilakukan tidak konsisten atau berbeda-beda, dan membuat hal ini menarik untuk dilakukan penelitian kembali dengan berfokus pada pemda yang berada di Provinsi Aceh dan Sumatera utara yang memiliki temuan kasus kelemahan pengendalian intern yang cukup tinggi dengan menggunakan tahun pengamatan yang lebih panjang.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Peneliti menggunakan teori keagenan sebagai teori utama dalam penelitian ini. Gilardi (2001) dan Storm (2000) dalam Halim dan Abdullah (2006) mengemukakan bahwa hubungan keagenan dalam pemerintahan daerah terlihat melalui tindakan pendelegasian kewenangan yang dilakukan oleh masyarakat kepada wakilnya di parlemen (legislatif) yang kemudian dari parlemen didelegasikan kepada pemerintah. Menurut *agency theory* pemerintah dalam menjalankan tugasnya selaku agen harus diawasi melalui pengimplementasian pengendalian intern secara optimal guna memberikan kepastian bahwasanya tugas yang dijalankan oleh pemerintah dalam mengelola suatu daerah telah dijalankan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga akan mengurangi terjadinya *information asymmetry*, sekaligus akan mengurangi tindak kecurangan dan penyelewengan yang disebabkan oleh berkurangnya *information asymmetry*.

Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Teori stakeholder menjelaskan, mengenai tanggungjawab perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan ketika perusahaan tersebut menjalankan tugasnya. perusahaan dalam hal ini adalah pemerintah daerah, dimana dalam menjalankan tugasnya pemerintah harus mampu memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat selaku stakeholder, Aifin (2016) dalam Subowo (2020). Teori stakeholder digunakan untuk mendasari pemilihan variabel ukuran pemda sebagai prediktor terjadinya kelemahan pengendalian internal. Pemerintah daerah dengan ukuran besar akan memiliki sumberdaya dalam jumlah besar pula untuk menunjang pelaksanaan tugasnya. Besarnya sumberdaya yang dimiliki akan memiliki resiko yang tinggi akan terjadinya penyelewengan. Oleh karena pemda akan mendapatkan tuntutan yang lebih besar dari stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya yang dimiliki, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemda kepada stakeholder, (Kristanto, 2009). Karenanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada

stakeholder pemerintah akan meningkatkan penerapan pengendalian internal yang memadai terhadap pengelolaan sumberdaya yang ada guna meminimalisir terjadinya *fraud* dan bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pengendalian Internal

Pengendalian intern ialah serangkaian proses yang terstruktur dan berkesinambungan satu sama lain, dimana proses ini dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh setiap pegawai maupun pimpinan organisasi yang dimaksudkan untuk memperoleh kepastian akan tepenuhinya tujuan dari organisasi secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, melindungi aset dari tindak kecurangan, sekaligus membangun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penjelasan tersebut diuraikan dalam peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008. Berdasarkan PERMENDAGRI NO 13 tahun 2006 disebutkan bahwasanya suatu pengendalian intern dikatakan telah berhasil diimplementasikan apabila kelima komponen yang terdapat dalam pengendalian intern tersebut terselenggara secara optimal. Lima komponen tersebut diantaranya, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian.

Kelemahan Pengendalian Internal

Berdasarkan SPKN yang merujuk pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dijelaskan kelemahan pengendalian intern adalah kondisi dimana pengendalian intern yang dijalankan mengalami kekurangan material pada desain dan operasinya sehingga menimbulkan masalah pengendalian intern yang mengganggu kegiatan organisasi dalam beroperasi. Untuk menentukan suatu pengendalian intern berjalan lemah dapat dilakukan dengan memperhatikan tingkat kesesuaian pengendalian internal dengan standar audit yang telah ditetapkan yaitu standar pemeriksaan keuangan Negara. BPK menilai kelemahan dalam implementasi sistem pengendalian intern pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi tiga aspek diantaranya adalah kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD, dan kelemahan struktur pengendalian intern.

Kompleksitas Daerah

Kompleksitas daerah ditandai dengan terjadinya diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas yang ada pada suatu entitas. Kiswanto, dkk (2020). Kompleksitas pemerintahan daerah juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang mempengaruhi pemerintahan daerah karena terdapatnya berbagai faktor dan karakteristik yang beragam pada daerah tersebut. Kompleksitas daerah dicerminkan dengan terdapatnya lapisan dalam suatu organisasi meliputi lapisan spesialisasi pemisahan tugas, lapisan total dalam hirarki kelembagaan, dan ukuran sejauh mana unit organisasi tersebar wilayahnya guna mencapai tujuan pelaksanaan kontrol internal. kompleksitas daerah dalam penelitian ini ukur dengan melihat jumlah kecamatan yang terdapat dalam suatu daerah. Diduga tingkat keberhasilan suatu pemda dalam menjalankan tugasnya akan mengalami penurunan jika suatu daerah memiliki tingkat kompleksitas daerah yang tinggi.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran suatu entitas pada hakekatnya dijadikan sebagai acuan untuk mengklasifikasikan skala besar atau kecilnya suatu entitas atau untuk mengetahui seberapa besar entitas tersebut (Putri dan Mahmud, 2015). Dalam konteks pemerintahan daerah Artha, dkk (2015) total aset merupakan suatu skala ukur yang dapat memproksikan ukuran sebuah pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah akan sejalan dengan besar kecilnya total aset

yang dikuasai, (Khasanah dan Rahardjo, 2014) dalam (Budiarto, dkk, 2019). Artinya total aset yang besar pada pemda akan mengindikasikan bahwa ukuran pemda tersebut yang juga besar, begitu juga sebaliknya. Menurut Sumarjo (2010) dalam Artha, dkk (2015) total aset yang besar akan mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah yang baik dalam memenuhi tanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2016: 9) pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran prestasi dari perkembangan ekonomi suatu daerah dengan membandingkannya dengan satu periode ke periode berikutnya, perkembangan fiskal produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal diindikasikan melalui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Apabila aktivitas perekonomian suatu daerah meningkat dari tahun sebelumnya maka dapat diindikasikan bahwa daerah tersebut sedang mengalami pertumbuhan ekonomi. Boediono (1985) dalam Majid, dkk (2017) mengemukakan bahwa dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dalam lingkup regional aspek penting yang digunakan ialah PDRB daerah tersebut.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah mengemukakan berbagai faktor yang menjadi prediktor terjadinya kelemahan pengendalian intern. Penelitian oleh Amir Mahmud dan Novi Kumala Putri (2015) meneliti variabel pertumbuhan ekonomi, pad, ukuran dan kompleksitas dalam melihat determinannya terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah kabupaten/kota pemerintahan Indonesia Bagian Barat tahun 2012. Dimana hasil penelitian ini menemukan bahwa hanya variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah, sedangkan variabel lain yang diteliti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Penelitian yang senada juga dilakukan oleh Abdul Majid, dkk (2017), dimana meneliti variabel pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah daerah, dan pendapatan asli daerah dalam melihat keterkaitannya dengan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah se-Indonesia tahun 2013. Penelitian ini menemukan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern sedangkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern.

Selanjutnya, Dwi Martani dan Fazri Zaelani (2011) juga melakukan penelitian serupa pada tahun 2011, yang meneliti tentang pengaruh ukuran pemerintah daerah, pertumbuhan, dan kompleksitas daerah terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern, ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh C. Petrovits, dkk (2010) yang meneliti tentang pengaruh pertumbuhan, kompleksitas, ukuran, opini laporan keuangan, resiko keuangan terhadap kelemahan pengendalian intern pada organisasi nirlaba Amerika Serikat tahun 1999-2007. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kelemahan pengendalian intern akan meningkat ditemukan pada organisasi nirlaba yang kompleks, sedang bertumbuh, berukuran lebih kecil dan dalam kondisi keuangan yang buruk.

Hubungan Kompleksitas Daerah dengan Kelemahan Pengendalian Internal

Terdapat berbagai aspek yang bisa digunakan untuk mengukur kompleksitas daerah dan jumlah kecamatan ialah salah satu aspek yang bisa digunakan dalam memproksikan tingkat kompleksitas suatu daerah (Martani dan Zaelani, 2011). Berdasarkan teori keagenan

disebutkan, masalah keagenan seperti *moral hazard* dapat dengan mudah timbul apabila terjadi *monitoring disability*, dimana pemerintah daerah selaku agen akan berpotensi untuk menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat sebagai principal akibat kurangnya pengawasan terhadap tugas yang dijalankan (Halim dan Abdullah 2006). Kompleksnya pemerintahan daerah yang ditandai dengan banyaknya jumlah kecamatan yang memiliki letak area kerja yang tersebar menyebabkan kegiatan yang dikendalikan akan semakin banyak sehingga konsistensi penerapan pengendalian intern yang sesuai ketentuan pada setiap kecamatan akan sulit diawasi oleh pemda, dan menyebabkan pengawasan yang dilakukan kurang maksimal (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Akibat tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemda terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal pada kecamatan, menyebabkan proses pemantauan yang dilakukan oleh kecamatan melalui penilaian terhadap pengendalian internal tidak berjalan baik dan hasil evaluasi terhadap sistem tidak segera ditindak lanjuti, yang mengakibatkan tidak terpetaknya permasalahan pengendalian internal yang terjadi pada kecamatan. Sehingga hal tersebut akan mengganggu pelaksanaan kegiatan pengendalian internal, yang kemudian menimbulkan masalah kelemahan pengendalian intern pada pemda. Maka hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan ialah:

H₁: Kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern.

Hubungan Ukuran Pemerintah Daerah dengan Kelemahan Pengendalian Internal

Ukuran pemerintah daerah merupakan sebuah aspek yang dimaksudkan untuk mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu pemerintah daerah, (Alawiyah, dkk, 2020). Dalam pemerintahan daerah ukuran pemda dapat diproksikan dengan total aset. Teori stakeholder menjelaskan bahwa pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik agar berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk menjaga hubungan baiknya dengan masyarakat selaku stakeholder. Sumarjo (2010) dalam Artha, dkk (2015) menjelaskan bahwa total aset yang besar akan mendukung pemerintah daerah dalam upaya memenuhi tanggung jawabnya kepada publik. Karenanya pemda yang memiliki aset dalam jumlah besar akan disadarkan untuk meningkatkan pengawasan yang baik melalui penerapan sistem pengendalian internal yang optimal untuk menjaga keamanan aset yang dimiliki dari segala bentuk kecurangan agar upaya untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat dapat tercapai (Hartono, dkk 2014). Pemerintahan daerah yang memiliki ukuran yang besar akan lebih optimal dalam menerapkan sistem pengendalian internal karena memiliki sumber daya yang cukup untuk menerapkan pengendalian intern secara lebih optimal dengan melakukan *maintanance* terhadap sistem yang diterapkan, sehingga akan meminimilisir terjadinya masalah pengendalian intern, (Putri dan Mahmud, 2015). Atas dasar uraian tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kelemahan pengendalian internal

PDRB adalah aspek yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah dalam lingkup regional. Pemerintahan kabupaten kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya ditopang dengan perkembangan investasi modal swasta dan pemerintah serta berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat. Yang mana harus diawali dengan pengalokasian belanja pemerintah yang tepat, sistem birokrasi yang handal, dan regulasi yang mendukung iklim investasi. Karenanya untuk menunjang terjadinya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah pemerintah daerah akan memprioritaskan untuk

mengalokasikan belanja pemerintah pada sektor-sektor ekonomi produktif yang dirasa mampu meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga menunjang pertumbuhan ekonomi seperti memberikan sarana dan prasarana yang mendukung jalannya sektor industri atau memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan resiko terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu akibatnya pemerintah dalam menggerekan sektor perekonomian melalui pengalokasian belanja yang tepat akan menyeimbangkan pengendalian internal menjadi lebih kompleks karena banyaknya kegiatan yang akan dikendalikan (Hartono, dkk, 2015).

Doyle, Ge dan McVay (2007) menyebutkan proses penyesuaian kegiatan pengendalian intern yang baru akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam penerapannya, Karena lamanya waktu penyesuaian pengendalian internal akibat peningkatan aktivitas ekonomi, memungkinkan untuk belum terlaksana atau ditetapkannya kebijakan atau prosedur pengendalian yang tepat. Sehingga selama rentang waktu untuk menyesuaikan pengendalian intern tersebut akan memungkinkan terjadinya masalah-masalah pengendalian intern dalam pemerintah daerah, yang menyebabkan lemahnya pengendalian intern, (Martani dan Zaelani, 2011). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H₃: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian kausatif, dimana tujuan daripada penelitian ialah, untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Adapun yang dijadikan populasi penelitian dalam riset ini ialah seluruh pemerintah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tahun 2017-2019 yang berjumlah 56 kabupaten/kota. Metode sampel yang digunakan untuk pemilihan sampel yang akan dijadikan sebagai objek penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling. Dimana sampel penelitian akan ditentukan melalui pertimbangan dan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, (Sugiyono, 2011: 85). Jumlah sampel yang diperoleh melalui hasil penyeleksian sampel yang telah dilakukan berjumlah sebanyak 52 kab/kota yang akan dijadikan sebagai objek penelitian oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang telah diaudit BPK dan data Produk Domestik Regional Bruto yang diperoleh dari situs badan pusat statistik (BPS) tahun 2017-2019. Yang mana data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Selain itu peneliti juga menggunakan studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan sekaligus mendukung penelitian ini.

Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel Dependen

Variabel kelemahan pengendalian internal pemerintah diproksikan dengan total temuan kasus kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) yang diungkapkan BPK melalui laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan masing-masing pemerintah daerah.

Variabel Independen

a. Kompleksitas Daerah

Kompleksitas daerah ialah tingkat diferensiasi yang terdapat dalam suatu pemerintah daerah. Kompleksitas daerah diukur dengan melihat jumlah kecamatan yang terdapat pada masing-masing kabupaten/kota (Martani dan Zaelani, 2011).

b. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah merupakan sebuah aspek yang dimaksudkan untuk mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu pemerintah daerah. Penghitungan variabel ukuran pemerintah daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Ukuran} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

c. Pertumbuhan Ekonomi

Variabel pertumbuhan ekonomi dalam penelitian diproksikan dengan menggunakan pertumbuhan PDRB atas harga konstan daerah. Adapun perhitungan yang dapat digunakan untuk mengitung pertumbuhan ekonomi daerah, ialah:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi: } \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif ditujukan untuk menggambarkan data penelitian dengan menginterpretasikanya melalui nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel, hingga diperoleh data yang jelas dan memberikan kemudahan untuk dipahami (Ghozali, 2016: 19).

Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan dari pada dilakukanya analisis regresi berganda ialah guna memberikan penjelasan terkait pengaruh dari dua atau lebih varaiebel independen terhadap variabel dependen, serta mendeskripsikan arah hubungan variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016: 94). Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Untuk mengetahui penjelasan tentang tingkat normalitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Tingkat signifikansi yang ditetapkan adalah 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan sebagai alat pengujian untuk melihat tingkat kenormalan data penelitian ini. Adapun tingkat signifikansi yang ditetapkan ialah 0,05 ($\alpha = 5\%$). Syarat sebuah data dikatakan telah berdistribusi normal adalah jika nilai signifikansinya $> 0,05$.

b. Uji heterokedastisitas

1) Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot*. Jika pada grafik *Scatter Plot* memperlihatkan tidak adanya terbentuk pola tertentu, titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Kriteria pengambilan keputusan yang dilakukan untuk mendeteksi terdapatnya masalah multikolinieritas dalam penelitian ialah dengan membandingkan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai yang biasa dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

d. Uji Autokorelasi

Penelitian ini menggunakan uji Durbin-waston (uji DW) dalam mendeteksi ada atau tidaknya ditemukan masalah autorokelasi dalam penelitian. Suatu model regresi dikatakan sempurna apabila datanya terbebas dari masalah autokorelasi.

1. Uji Kelayakan Model

a. Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui kemampuan dari model penelitian dalam menerangkan variabel dependen, peneliti dalam penelitian ini melakukan uji Koefisien Determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi (R) berkisar antara 0 hingga 1, apabila $R^2 = 0$ ini berarti model penelitian yang telah ditentukan tidak memiliki keterkaitan antara variabel independen dan dependennya, namun bila nilai $R^2=1$ berarti suatu hubungan yang sempurna.

b. Uji F (Simultan)

Agar mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama maka peneliti mendeteksinya melalui pengujian F (simultan) dalam penelitian ini. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini ialah dengan memperhatikan nilai signifikansi yang diperoleh. Dimana jika nilai probabilitas $F > 0,05$, H_0 diterima, H_1 ditolak, dan bila nilai probabilitas $F = 0,05$, H_0 ditolak, H_1 diterima.

c. Uji t (Parsial)

Untuk mendeteksi pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, peneliti mendeteksinya melalui uji t (parsial). Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini ialah dengan memperhatikan nilai signifikansi yang diperoleh atas masing-masing variabel. Dimana bila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau probabilitas $<$ tingkat signifikansi ($\text{Sig} < 0,05$) maka dapat diambil kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, sementara itu H_a dikatakan ditolak dan H_0 diterima apabila dalam pengujian mendapati nilai $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau probabilitas $>$ tingkat signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif ditujukan untuk menggambarkan data penelitian dengan menginterpretasikannya melalui nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut adalah hasil analisis statistik yang peneliti lakukan.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

						Std.
KOMPLEKSITAS	156	2.00	27.00	1923.00	12.3269	6.39875
UKURAN PEMDA	156	25.97	31.12	4431.66	28.4081	.58326
PERTUMBUHAN	156	1.26	12.45	768.27	4.9248	1.17702
KELEMAHAN SPIP	156	2.00	11.00	949.00	6.0833	1.91078
Valid N (listwise)	156					

Sumber: Data olahan SPSS 2021

Hasil analisis statistik deskriptif yang ditunjukkan dalam tabel 1 diatas mengindikasikan bahwa dari 156 data pemerintah kabupaten/kota yang ada pada Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, untuk variabel kelemahan pengendalian intern memiliki nilai

terendah (minimum) adalah 2,00 Sementara itu nilai tertinggi (maksimum) adalah 11,00. Rata-rata (mean) dari kelemahan sistem pengendalian internal atas 156 pemerintah daerah adalah 6,0833 dan standar deviasinya adalah 1,91078. Variabel kompleksitas daerah memiliki jumlah kecamatan paling rendah (minimum) 2,00, sementara jumlah kecamatan paling tinggi (maksimum) adalah 27,00. Rata-rata (mean) dari kompleksitas daerah adalah 12,3269 dan standar deviasinya adalah 6,39875. Variabel ukuran pemda memiliki nilai minimum 25,97, sementara nilai tertinggi (maksimum) adalah 31,12. Rata-rata (mean) atas ukuran pemerintah daerah adalah 28,4081 dan standar deviasinya adalah 0, 5832. Berikutnya variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan ekonomi paling rendah (minimum) adalah 1,26 sementara pertumbuhan ekonomi paling tinggi (maksimum) adalah 12,45. Rata-rata (mean) atas pertumbuhan ekonomi adalah 4,9248 dan standar deviasinya adalah 1,17702.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 2
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	22.148	8.612		2.572	.011		
KOMPLEKSITAS DAERAH	.072	.028	.241	2.557	.012	.694	1.440
UKURAN PEMDA	-.639	.312	-.195	-2.047	.042	.679	1.473
PERTUMBUHAN EKONOMI	.246	.129	.151	1.902	.059	.973	1.028

a. Dependent Variable: KELEMAHAN SPIP
Sumber: Data olahan SPSS 2021

Hasil analisis regresi berganda di atas secara sistematis hasil analisis regresi berganda ditulis sebagai berikut:

$$Y = 22,148 + 0,072X_1 - 0,639X_2 + 0,264X_3$$

Berdasarkan hasil analisis diatas diperoleh nilai konstanta adalah sebesar 22,148, maknanya adalah, jika nilai variabel independen adalah 0 maka nilai variabel dependen adalah 22,148. Nilai koefisien regresi variabel kompleksitas daerah adalah 0,072 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kompleksitas sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah sebesar 0,072. Selanjutnya nilai koefisien untuk variabel ukuran pemerintah daerah adalah -0,639 menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan ukuran pemerintah daerah senilai satu satuan, maka kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah akan mengalami penurunan senilai 0,639. Terakhir variabel pertumbuhan ekonomi, memiliki nilai koefisien regresi pertumbuhan ekonomi adalah 0,264 menunjukkan ketika terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar satu satuan, maka kelemahan pengendalian intern akan meningkat senilai 0,264.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 3
Uji Kolmogorov – Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		156
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.85039062
Most Extreme Differences	Absolute	.045
	Positive	.045
	Negatif	-.035
Test Statistic		.045
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

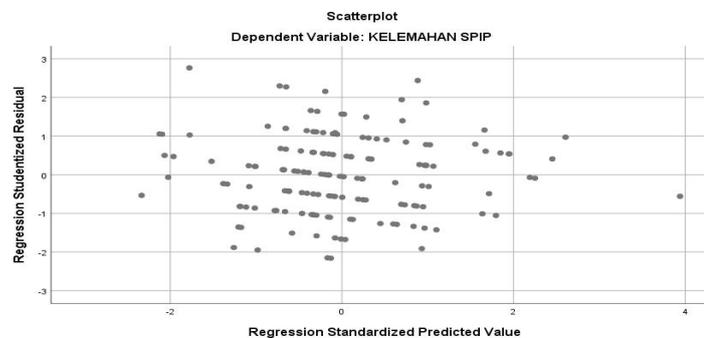
Sumber: Data olahan SPSS 2021

Tabel 3 diatas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,200 \geq 0,05$. Yang mana hal ini mengindikasikan bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Penelitian ini menggunakan grafik scatterplot dalam melihat ada atau tidaknya heterpedastisitas dalam data penelitian, dimana hasil pengujianya adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data olahan SPSS 2021

Hasil pengujian heterokedastisitas melalui grafik *scatterplot* yang telah peneliti lakukan, diperoleh kesimpulan bahwa data penelitian ini terbebas dari masalah heterokedastisitas, dimana pada grafik di atas dapat dilihat bahwa tidak ditemukannya pembentukan pola tertentu dan titik menyebar diatas serta dibawah angka 0 pada sumbu Y.

3. Uji Multikolinearitas

Hasil dari pada pengujian multikolinearitas ditampilkan dalam tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	22.14	8.612		2.572	.011		
KOMPLEKSITAS	.072	.028	.241	2.557	.012	.694	1.440
UKURAN PEMDA	-.639	.312	-.195	-2.047	.042	.679	1.473
PERTUMBUHAN	.246	.129	.151	1.902	.059	.973	1.028

a. Dependent Variable: KELEMAHAN SPIP

Sumber: Data olahan SPSS 2021

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa data penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Dimana pada tabel 4 di atas bagian *collinearity statistics* dapat diketahui nilai tolerance dari masing-masing variabel >10 dan nilai VIF setiap variabel lebih kecil dari 10, yang mengindikasikan tidak ditemukannya masalah multikolinearitas.

4. Uji Autorokorelasi

Hasil pengujian autorokorelasi dalam penelitian ini diinterpretasikan pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Hasil Uji Autorokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.249 ^a	.062	.044	1.86856	1.865

a. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN EKONOMI, KOMPLEKSITAS DAERAH, UKURAN PEMDA

b. Dependent Variable: KELEMAHAN SPIP

Sumber: Data olahan SPSS 2021

Penelitian ini terbebas dari masalah autorokorelasi, karena dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa nilai DW yang diperoleh adalah sebesar 1,865. Dengan jumlah data 156 dan K yang berjumlah 3 dalam penelitian ini maka didapatkan nilai DU sebesar 1,7776. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai DW pada penelitian ini berada diantara nilai DU dan nilai 4-DU ($1,7776 < 1,865 < 2,2224$), yang mengindikasikan terbebasnya penelitian ini dari masalah autorokorelasi.

Uji Kelayakan Model

1. Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 6
Adjusted R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.249 ^a	.062	.044	1.86856	1.865

a. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN EKONOMI, KOMPLEKSITAS DAERAH, UKURAN PEMDA

b. Dependent Variable: KELEMAHAN SPIP

Sumber: Data olahan SPSS 2021

Nilai R Square yang diterangkan dalam tabel 6 di atas ialah sebesar 0,044 atau 4,4%, artinya secara bersama-sama kemampuan ketiga variabel independen dalam menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen penelitian ini ialah sebesar 4,4%, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Uji F (Simultan)

Adapun uji F (simultan) yang peneliti lakukan dalam penelitian memperoleh hasil temuan sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji F Simultan

Model		Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	35.205	3	11.735	3.361	.020 ^b
	Residual	530.712	152	3.492		
	Total	565.917	155			

a. Dependent Variable: KELEMAHAN SPIP

b. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN EKONOMI, KOMPLEKSITAS DAERAH, UKURAN PEMDA

Sumber: Data olahan SPSS 2021

Hasil uji F (simultan) pada tabel 7 di atas menyimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat diperhatikan dalam tabel 7 diatas, dimana ditunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$ dan nilai Fhitung sebesar $3,36 > F_{tabel}$ sebesar 2,66. Yang mengindikasikan bahwa uji F (simultan) yang dilakukan ini menerima H_a dan menolak H_0 .

3. Uji T (Parsial)

Berdasarkan Uji t yang telah peneliti lakukan ditunjukkan oleh tabel dibawah ini:

Tabel 8
Hasil Uji T (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22.148	8.612		2.572	.011
	KOMPLEKSITAS	.072	.028	.241	2.557	.012
	UKURAN PEMDA	-.639	.312	-.195	-2.047	.042
	PERTUMBUHA	.246	.129	.151	1.902	.059

a. Dependent Variable: KELEMAHAN SPIP

Sumber: Data olahan SPSS 2021

Adapun hasil uji t (parsial) dalam penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Hipotesis pertama yang peneliti usulkan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa

hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima, yang mana pernyataan ini dapat diketahui melalui informasi yang diinterpretasikan pada tabel 8 yang menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar $2,55 > t_{tabel}$ 1,975 dengan nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar $0,012 < 0,05$ yang mengindikasikan secara parsial kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern.

Hipotesis kedua yang penulis ajukan menyatakan bahwa ukuran pemerintahan daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima, yang mana pernyataan ini dapat diketahui melalui informasi yang telah diinterpretasikan pada tabel 8 yang menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar $2,047 > t_{tabel}$ 1,975 dengan nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar $0,042 < 0,05$ yang mengindikasikan bahwa secara parsial ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern.

Selanjutnya Hipotesis ketiga (H3) yang peneliti ajukan sebelumnya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak, yang mana pernyataan ini dapat diketahui melalui informasi yang telah diinterpretasikan pada tabel 8 yang menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar $1,902 < t_{tabel}$ 1,975 dengan nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar $0,059 > 0,05$ yang mengindikasikan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

PEMBAHASAN

Pengaruh kompleksitas daerah terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini memberikan penjelasan bahwasanya kompleksitas daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Artinya kenaikan kompleksitas daerah akan berbanding lurus dengan temuan kelemahan pengendalian intern di daerah tersebut, yakni semakin tinggi kompleksitas suatu daerah yang ditandai dengan banyaknya jumlah kecamatan pada daerah tersebut maka akan menyebabkan temuan kelemahan sistem pengendalian intern pada daerah tersebut juga meningkat. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Adha, dkk (2019) menyatakan bahwa kompleksitas berpengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern, dimana semakin kompleks suatu organisasi maka akan semakin sulit juga organisasi tersebut untuk mengimplementasikan tujuannya dalam menjalankan pengendalian intern pemerintah, yang dapat menyebabkan meningkatnya masalah kelemahan pengendalian intern pada organisasi tersebut. Hal senada juga dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yaya dan Halim (2019), dan Hartono, dkk (2015) menemukan bahwa kompleksitas yang tinggi akan berakibat terhadap peningkatan masalah kelemahan sistem pengendalian intern yang diterapkan di daerah tersebut.

Adapun alasan yang mendasari hal di atas ialah, jika kompleksitas itu semakintinggi ditandai oleh banyaknya jumlah kecamatan dengan letak area kerja yang tersebar pada pemda tersebut maka kegiatan yang akan dikendalikan oleh pemda juga semakin banyak dan beragam, dimana hal tersebut menyebabkan pengendalian intern yang dijalankan semakin kompleks karena ruang lingkup pemerintahan dalam melakukan pengawasan dan

pengendalian menjadi semakin luas, sehingganya akan memberikan tantangan yang lebih besar kepada pemda dalam mengimplementasikan sistem pengendalian intern. Selain itu tingginya kompleksitas yang terdapat pada suatu daerah mengakibatkan tingkat pengawasan terhadap pengendalian intern yang dijalankan juga menjadi rendah (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Banyaknya kegiatan yang dikendalikan oleh pemda yang memiliki latar belakang berbeda menimbulkan terjadinya perbedaan beberapa prosedur pengelolaan keuangan pada setiap kecamatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga pemda mengalami kesulitan dalam melakukan konsolidasi laporan keuangan dari berbagai kecamatan.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jabarkan, dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini mendukung *teori agency*, yang menyebutkan bahwasanya pemerintah selaku agen berpeluang untuk menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan atau kepentingan dari principal dalam hal ini masyarakat akibat kurangnya pengawasan terhadap tugas yang dijalankan. Agen dalam hal ini pemerintah belum mampu menjalankan pengawasan yang sesuai dengan keinginan principal (masyarakat). Hal ini terbukti dari hasil temuan penelitian yang peneliti lakukan yang menyebutkan salah satu faktor yang menyebabkan masalah kelemahan pengendalian internal yang terjadi pada daerah yang memiliki kompleksitas daerah yang tinggi adalah dikarenakan kurangnya pengawasan pemda terhadap pelaksanaan tugas yang dijalankan pada setiap kecamatan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah peneliti lakukan penelitian ini menemukan bahwasanya ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan menggunakan total aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah. Hal ini memiliki makna bahwa kelemahan pengendalian intern akan semakin rendah ditemukan pada pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang besar. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Zaelani (2011) yang menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Sumberdaya yang cukup akan cenderung dimiliki oleh pemerintah daerah yang berukuran besar yang dipergunakan untuk kepentingan daerah itu sendiri. Organisasi yang berukuran lebih besar otomatis akan memiliki kemampuan finansial dan sumberdaya yang cukup dalam merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang lebih baik dan memadai (Putri dan Mahmud, 2015).

Alasan yang mendasari hal tersebut ialah, pemerintahan daerah yang memiliki ukuran yang besar akan lebih optimal dalam menerapkan sistem pengendalian internal karena memiliki sumber daya yang cukup untuk dialokasikan terhadap kepentingan organisasi dengan mengerahkan sumberdaya yang ada melakukan pengendalian yang baik untuk menjaga aset yang dimiliki dari segala bentuk kecurangan. Upaya tersebut dilakukan pemda dengan melakukan *maintance* terhadap sistem pengendalian intern yang diterapkan melalui pengadaan diklat atau *training* yang memadai secara berkala untuk memberikan pemahaman terkait sistem pengendalian intern yang dibangun kepada seluruh pegawai maupun pimpinan instansi pemerintah guna membangun komitmen dan menyamakan persepsi terhadap sistem pengendalian internal yang dijalankan dan mempermudah internalisasi pengendalian intern kepada seluruh pihak yang terlibat dalam institusi, agar dapat melaksanakan pengendalian intern yang lebih optimal sehingga akan mengurangi masalah kelemahan sistem pengendalian

internal pada pemerintah daerah.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengungkapan yang dilakukan BPK terkait kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah pada Kota Banda Aceh tahun 2017 yang memiliki ukuran pemerintah daerah yang cukup besar dengan total aset daerah diatas rata-rata aset pemerintahan daerah lainnya, yang memiliki temuan kasus kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 4 temuan, termasuk dalam kategori rendah atau sedikit. Hal ini mengindikasikan bahwasanya pemerintah telah menerapkan sistem pengendalian intern yang baik dalam lingkungan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini mendukung teori stakeholder, dimana pemerintah telah mampu menjalankan tugasnya yang sesuai dengan kepentingan *stakeholder* yang dalam hal ini masyarakat. Pada hakikatnya aset yang dimiliki oleh daerah merupakan milik masyarakat, dan masyarakat merupakan pihak yang berkepentingan. Pemerintah telah mampu menjalankan tanggungjawabnya terhadap masyarakat selaku stakeholder dengan meningkatkan pengendalian intern yang baik agar aset yang dimiliki dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

Pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini memberikan penjelasan bahwasanya, hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak yang artinya pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Temuan penelitian ini tidak mendukung temuan penelitian yang dilakukan oleh Petrovits, dkk (2010) yang menemukan kasus kelemahan pengendalian internal lebih banyak ditemukan pada organisasi yang sedang bertumbuh atau pertumbuhan ekonominya yang lebih tinggi. Akan tetapi hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Suprobo (2017), dan Nurwati dan Trisnawati (2015) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah.

Hal ini dikarenakan penelitian ini menemukan bahwasannya sebagian besar pemerintahan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat, tidak diikuti dengan peningkatan ataupun penurunan kasus kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah pada suatu daerah tersebut. Hal ini dibuktikan melalui temuan kasus oleh BPK RI di kabupaten Aceh Barat tahun 2018 yang memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 10,14% ditemukan sebanyak tujuh temuan atas kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah seperti pengelolaan uang persediaan dibendahara pengeluaran yang belum memadai, penganggaran dan penyaluran bansos yang tidak sesuai ketentuan, pengamanan barang persediaan SKPK yang belum sepenuhnya memadai, dan lain lain. Sementara itu pada pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah justru memiliki temuan kelemahan sistem pengendalian intern yang lebih tinggi yaitu sebesar 10 temuan kasus kelemahan sistem pengendalian intern. Namun ada pula pemerintahan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah memiliki temuan kasus kelemahan pengendalian intern yang juga sedikit seperti pemerintahan kabupaten Tapanuli Utara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi 4,15% pada tahun 2017 yang memiliki temuan kasus kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak lima temuan.

Dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan, yang menyebutkan masalah keagenan seperti *self interest* akan meningkat saat terjadinya

pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga menyebabkan kelemahan pengendalian intern menjadi meningkat. Hal ini dikarenakan tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak menjamin pengendalian intern yang diterapkan sudah optimal atau tidak. Santika (2005:19) dalam Fauza (2015) menyatakan dalam pengendalian intern yang telah ditetapkan pada suatu entitas tidak berarti penyelewengan dan kesalahan tidak dapat terjadi, karena setiap pengendalian yang diterapkan pasti memiliki keterbatasan sendiri dalam implementasinya. Seperti dalam temuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dimana kelemahan pengendalian intern pemda tidak selalu ditemui pada pemda yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi akan tetapi juga ditemukan pada pemda yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah.

Hasil penelitian ini juga senada dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Hartono, dkk (2015) yang juga menyatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Sasaran atau tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini ialah untuk memberikan penjelasan terkait faktor yang mempengaruhi terjadinya kelemahan pengendalian intern pemerintah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tahun 2017-2019. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh simpulan penelitian sebagai berikut:

1. Kompleksitas daerah berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah, dimana semakin tinggi kompleksitas suatu daerah maka akan semakin tinggi juga ditemukan kasus terkait kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.
2. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah, dimana semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan semakin rendah temuan terkait kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah di daerah tersebut.
3. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah, yang berarti hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak, dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak mempengaruhi atau menyebabkan meningkatnya tingkat kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah tersebut.

Keterbatasan

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini belum dapat dikatakan telah sempurna dan masih memiliki beberapa keterbatasan penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terfokus pada pemerintahan daerah yang berada di provinsi Aceh dan Sumatera Utara saja. Hal ini memungkinkan hasil penelitian yang telah dilakukan akan berbeda jika dilakukan pada daerah lain, mengingat karakteristik masing masing wilayah atau pemerintahan daerah berbeda satu sama lainnya.
2. Dalam menguji keterkaitannya terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel. Berdasarkan nilai koefisien determinasi yang telah diujikan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 4,4% yang berarti variabel kompleksitas daerah, ukuran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi hanya mampu mempengaruhi kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah

sebesar 4,4%. Artinya masih ada variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang mempengaruhi kelemahan sistem pengendalian intern sebesar 95,6%.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kelemahan sistem pengendalian intern. Dengan cara meningkatkan pengawasan terhadap pengendalian intern yang dijalankan melalui pemantauan atau monitoring secara berkala kepada setiap segmen organisasi pemerintahan dan mensosialisasikan setiap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan kepada seluruh pegawai secara optimal, serta melakukan komunikasi yang intensif dalam lingkungan pengendalian pemerintah untuk mengatasi masalah yang terjadi agar masalah tersebut dapat terpetakan secara tepat, sehingga kompleksitas daerah yang tinggi tidak menyebabkan kelemahan pengendalian intern menjadi meningkat. Selain itu pemerintah daerah yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi ataupun rendah diharapkan dapat melakukan penyesuaian dan memperbaiki prosedur pengendalian intern pemerintah daerah guna meminimalisir terjadinya resiko kelemahan pengendalian intern, karena keduanya memiliki kemungkinan terjadinya peningkatan kelemahan pengendalian intern pemerintah.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel penelitian dengan memperluas wilayah penelitian agar tingkat generalisasinya lebih baik. Selain itu penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi kelemahan pengendalian intern seperti dana transfer diantaranya DAU, DAK, dan DBH yang mana variabel ini masih sangat minim diteliti dalam melihat keterkaitannya dengan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Ahmad Fadhillah, Nunuy Nur Afiah, Arie Pratama. 2019. *Pengaruh Ukuran Entitas dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Internal*. *Jurnal Sistem Informasi Keuangan dan Perpajakan*. 3 (2): 122-134
- Alawiyah, Tina Tuti. 2020. *Determinan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah Kabupaten/Kota provinsi jawa timur*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. 8 (3): 415-424.
- Artha, Risma Diri, Prayitno Basuki dan MT Alamsyah. 2015. *Pengaruh Karakteristik Daerah Dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB)*. *Jurnal InFestasi*. 11(2): 214-229.
- Badan Pemeriksaan Keuangan 2019. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*. <https://www.bpk.go.id/ihps>. Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2021.
- Doyle, J, Ge, Welli, McVay, S. 2007. *Determinants of weakness in internal control over financial reporting*. *Journal Of Accounting And Economics*. 44 (12): 193-223.
- Ghozali, I. 2016, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. 2 (1): 53-64
- Hartono , R., A. Mahmud dan N. S. Utaminingsih. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah*. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram. Lombok. Halaman: 1-13
- Indonessian Corruption Watch (ICW). Diakses pada tanggal 27 april 2021. <https://antikorupsi.org>.
- Kiswanto, Ain Hajawiyah, Yunindya Lazty Mahera. 2020. *Factors Influencing The Weaknesses Of Internal Control Of Local Governments In Indonesia*. *Humanities & Social Reviews*. 8 (1): 122-129
- Kristanto, Septian Bayu. 2009. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Intern. Jurnal Akuntansi UKRIDA. 9(1).
- Majid, Abdul. Hj. Rr.Titiek Herwanti. Nur Fitriah. 2017. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia)*. Jurnal Magister Manajemen. 6 (1): 1-21.
- Martani, D dan Zaelani, F. 2011. *Pengaruh Ukuran Pertumbuhan Dan Kompleksitas Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia*. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*. Halaman 1-27
- Petrovits, Christine. Catherine Shakespeare. Aimee Shih. 2011. *The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations*. *The accounting review*. 86 (1): 325-357
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Putri, Novi Kumala dan Amir M. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Ukuran, dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemda*. *Accounting Analysis Journal*. 4(2).
- PermenpanRB NO 67 tahun 2011 tentang *Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah*.
- Sutaryo dan Dedi Sinaga. 2018. *Government internal control system maturity: the role of internak guidance and external control of local goverment in indonesia*. *Journal Of Accounting And Investment*. 19 (1): 24-35
- Subowo, Triono. 2020. *Peran Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Dalam Memoderasi Faktor Kelemahan Sistem Pengendalian Internal*. *Gorontalo Accounting Journal*, 3(1): 43-54.
- Setyaningrum, Dyah dan Febriyanti Syafitri. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 9(2): 154-170.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cetakan Ke-4. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2016. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi ke-3. Rajawali Pers: Jakarta.
- Yaya, Rizal dan Halim Sri Suprobo. 2019. *Determinants Of Weakneses in Internal Control Of Provincial Government Indonesia*. *Jurnal Of Accounting and Investment*. 20 (3): 296-309.